



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## UPAYA PERCEPATAN PENANGANAN BANJIR DEMAK

**Suhartono**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[suhartono2@dpr.go.id](mailto:suhartono2@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Maret 2024 melakukan kunjungan ke Kabupaten Demak yang sedang dilanda bencana banjir besar. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terdapat 11 kabupaten/kota terdampak di Jawa Tengah akibat dari bencana ini. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Demak, Agus Nugroho, mengungkapkan banjir yang terjadi sejak Senin (18/03) membuat 90 desa di 11 kecamatan di Demak terendam banjir dan telah berdampak pada lebih dari 97.000 orang dan lebih kurang 25.000 orang harus mengungsi. Dari cakupan wilayah yang terdampak dan dampak kerugian bagi masyarakat, bencana banjir yang terjadi merupakan bencana terburuk dalam 30 tahun terakhir. Hingga saat ini, transportasi Demak, Kudus, dan Jepara terputus.

Presiden menggarisbawahi bahwa bencana banjir Demak disebabkan oleh cuaca ekstrem yang menyebabkan intensitas hujan melebihi 238 milimeter dan melampaui kapasitas bendungan atau tanggul yang ada, sehingga berimbas pada jebolnya sejumlah tanggul penahan aliran sungai yang ada. Selain itu, pembalakan liar pada hulu sungai memperburuk kapasitas tangkapan air yang berperan mengurangi debit air sungai yang melintasi daerah pantai utara. Sedangkan pakar iklim dari BRIN mengungkapkan, banjir yang melanda pesisir utara Jawa Tengah disebabkan oleh perubahan iklim yang ditandai dengan fenomena *squall line* yang menghasilkan hujan badai dengan intensitas yang tinggi selama sepuluh hari.

Peristiwa banjir di Demak memberikan gambaran pentingnya mengevaluasi kapasitas infrastruktur penanggulangan banjir di daerah pesisir dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrem. Kapasitas infrastruktur yang ada sudah seharusnya dapat mengantisipasi fenomena perubahan iklim. Selain itu, penanganan daerah hulu aliran sungai juga perlu diperkuat dengan menjaga area hutan yang masih ada dan menambah luasannya, sehingga kapasitas daerah hulu semakin meningkat dalam menangkap air hujan dan infrastruktur pengendali banjir dapat mengantisipasi peningkatan volume air akibat cuaca ekstrem. Teknologi yang ada, pemodelan perubahan iklim, dan perubahan lingkungan seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan kapasitas mitigasi dari kemungkinan bencana banjir di daerah pesisir Jawa Tengah.

Selain mitigasi penyebab banjir, BNPB dan BPBD harus terus meningkatkan kapasitas penanganan pengungsi dan korban terdampak. Isu para pengungsi belum mendapat bantuan atau kesulitan mendapatkan bantuan agar diantisipasi. Hal tersebut agar badan penanggulangan bencana selalu siap dalam menyelenggarakan dan mengoordinasikan penanganan korban dan pengungsi yang terdampak bencana.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

 <https://pusaka.dpr.go.id>

 @pusaka\_bkdprri

## Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

## Ekkuinbang

Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Nidya W. Sayekti  
Monika Suhayati

## Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## EDITOR

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

©PusakaBK2024

## Atensi DPR

Banjir di pesisir utara Jawa Tengah khususnya di daerah Demak, Kudus, dan Jepara yang terjadi saat ini menunjukkan luasnya daerah dan masyarakat yang terdampak. Perubahan iklim menuntut antisipasi dalam peningkatan kapasitas infrastruktur pengendalian banjir, prediksi perubahan cuaca, dan penanganan masyarakat yang terdampak. Untuk itu, pembangunan, pemeliharaan, dan evaluasi atas infrastruktur pengendalian banjir perlu menjadi perhatian bagi Komisi V DPR RI. Selain itu, Komisi V DPR RI perlu menaruh perhatian pada peningkatan kapasitas keakuratan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam memprediksi perubahan cuaca yang berpotensi menyebabkan banjir besar seperti terjadi di Demak. Komisi V juga perlu mendorong BNPB meningkatkan kapasitas dalam menangani korban dan masyarakat yang terdampak bencana agar segera mendapatkan bantuan.

## Sumber

bnpb.go.id, 21 Maret 2024;  
cnnindonesia.com, 20 Maret 2024;  
kompas.com, 23 Maret 2024;  
tempo.co, 24 Maret 2024.